

Membebaskan Ilmu Sosial dari Keterperangkapan Ganda

*Gumilar Rusliwa Somantri**

Abstract:

Social Science in Indonesia facing the challenge to be more autonomous. The science and scientist have to involve themselves in a productive dialog with the Western tradition and, at the same time, play a significant role in answering the problems related to the ongoing social change. It seems, it is a must for social science to escape itself from the multiple traps of assumption, theory, methodology and orientation, in order to answer successfully the challenge of dynamics of humanity and civilization.

Kata-kata kunci:

*Ilmu sosial; perubahan sosial; pengetahuan impor;
dekolonisasi ilmu sosial*

Pengantar

Ilmu sosial di negara berkembang terutama di Indonesia dite-ngarai tengah tenggelam di lembah infertilitas. Disiplin ilmu ini relatif belum berhasil melahirkan gagasan-gagasan besar serta berperan sebagai inspirator utama dalam pemecahan masalah kemanusiaan dan

* *Gumilar Rusliwa Somantri* adalah dosen pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.

peradaban di tengah gelora perubahan sosial yang terjadi.¹ Pada kasus Eropa di masa silam, perubahan sosial yang dahsyat telah menjadi rahim bagi lahirnya pemikiran-pemikiran seminal seperti dapat disimak pada karya Hegel, Nietzsche, Durkheim, Marx, dan Weber. Kami dalam tulisan ini akan berangkat dari cara pandang bahwa infertilitas ilmu sosial dalam membedah dan mengurai kontur perubahan sosial Indonesia terkait erat dengan keterperangkapannya di tataran asumsi, teori, maupun metodologi. Pertanyaan pokok di sini adalah, ilmu sosial seperti apa yang perlu dikembangkan di masa mendatang?

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian kepustakaan mengenai perkembangan ilmu sosial, terutama merujuk pada cara pandangnya mengenai perubahan sosial, dan menelisik pemikiran seputar format ilmu sosial dalam konteks Indonesia. Struktur isi dari tulisan ini dirunut sebagai berikut. Tulisan ini akan mendiskusikan *genre* pemikiran dalam ilmu sosial serta implikasi metodologisnya pada bagian kedua dari artikel ini. Ilmu sosial Indonesia sebagai "*imported-knowledge*" mempunyai struktur yang rumit dari keterperangkapan ganda. Hal ini akan diurai secara tajam di bagian ketiga. Sedangkan bagian keempat akan berisi diskusi mengenai "otonomi" ilmu sosial sebagai langkah pembebasan dari keterperangkapan ganda di atas. Bagian terakhir akan mengangkat kiprah ilmu sosial sebagai inspirator penyelesaian masalah kemanusiaan dan peradaban yang menyertai kehadiran gelombang perubahan sosial.

Menjelajahi Lansekap "*Imported Knowledge*" Ilmu Sosial

Dewasa kini ilmu sosial telah berkembang pesat tidak saja dalam teori dan pendekatan-pendekatan ilmu sosial, namun juga metodologi termasuk strategi dan teknik penyelidikan. Kita dapat menemukan ragam istilah yang merujuk pada keberadaan aneka "paradigma" seperti positivisme, post-positivisme, strukturalisme, post-strukturalisme, fungsionalisme, pluralisme, interaksionisme simbolik, konflik dan lain sebagainya. Peta teori pun kini tidak sempit sekitar wacana "klasik-modern". Namun, diskusi merambah hingga tradisi kritis, dan post-

¹ Gumilar Rusliwa Somantri, '*Towards Democracy Beyond Societies: A Study of Internet Practices in Indonesian Politics.*' Dalam Indrajit Banerjee (ed), *Rhetoric and Reality: The Internet Challenge for Democracy in Asia*, (Singapore: Eastern Universities, 2003), hlm 97-117.

modernisme. Metodologi penelitian pun kini semakin maju dan para ilmuwan sosial tidak lagi terpaku pada tradisi *mainstream methodology* yang positivistik seperti metoda survey dan kualitatif-konvensional.² Banyak di antara mereka mengembangkan metodologi non-positivistik terutama kualitatif non-konvensional. Sebagai contoh tradisi teori sosial kritis dan "*cultural studies*", banyak menggunakan metoda analisa wacana, analisa percakapan, semiologi, hermeneutiks, dan lain-lain.

Tulisan ini tidak akan mengikuti pemetaan ilmu sosial berdasarkan pengelompokan paradigmatik seperti banyak ditemukan dalam literatur teori sosial dan metodologi.³ Namun, tulisan ini akan membuat pemetaan aliran pemikiran (*genre*) berdasarkan cara pandang mereka mengenai perubahan sosial. Pemetaan ini akan melihat pula implikasi metodologis dari masing-masing kelompok pemikiran tersebut.

Menurut hemat kami dalam ilmu sosial, setidaknya terdapat lima *genre* pemikiran dalam upaya menjelaskan lansekap perubahan sosial.⁴ Tiga *genre* pertama mewakili cara pandang yang mengeksplor "*social as society*", yaitu konstruktivisme, rekonstruktivisme dan dekonstruktivisme. Ketiganya diikat oleh tiga kesamaan premis dasar: (1) meyakini masyarakat sebagai hal yang maujud; (2) motor penggerak dari perubahan sosial adalah rasionalisasi yang pada hakekatnya memuat ruh pencerahan (*enlightenment/Aufklaerung*), dan (3) perubahan sosial dalam masyarakat secara umum dilihat pada tiga tahap seperti tradisional, modern dan pasca modern.

² Dedy Nur Hidayat, (2005). 'Teori dan Penelitian dalam Teori-Teori Kritis.' *Jurnal Thesis*, Volume IV/No. 2 Mei-Agustus 2005, lihat juga Dedy Nur Hidayat, "Teknik Penulisan Proposal Penelitian Berorientasi Murni Akademik", makalah dalam *Workshop Pengembangan Penelitian FISIP-UI*, Depok 30 Januari 2000

³ Salah satu ulasan yang cukup baik mengenai pengelompokan paradigma dan teori ilmu sosial (sosiologi) dapat dilihat dalam William D. Purdue (1986). *Sociological Theory: Explanation, Paradigm and Ideology*. California: Mayfield Publishing Company.

⁴ Pemetaan dalam lima *genre* lebih ditujukan untuk keperluan penulisan ini yang berangkat dari perspektif penulis sendiri dalam melihat perkembangan ilmu sosial, khususnya sosiologi. Penulis menyadari akan kemungkinan terjadinya simplifikasi dan reduksi atas semesta khasanah ilmu sosial beserta aliran-alirannya. Oleh karenanya, pengkajian atas *genre* ini masih bersifat awal dan memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Sedangkan *genre* keempat dan kelima adalah ilmu sosial "*beyond society*". Ia mengeksplor "*social*" tidak sebagai masyarakat, namun sebagai "*mobilitas*" (*social as mobility*). Premis dasar *genre* teori ini secara radikal berbeda dengan tiga kelompok teori pendahulunya, yaitu (1) mempertanyakan bahkan tidak meyakini adanya entitas yang bernama masyarakat; dan (2) melihat rasionalisasi pada tataran lanjut dengan merujuk pada lahirnya peranan penting empat jangkar realitas sosial yaitu alam (*nature*), negara (*state*), arena global, serta "masyarakat" sipil termasuk *global civil "society"*; dan (3) perubahan sosial bersifat "*beyond society*" dengan lebih memperhitungkan aneka ragam mobilitas dari aktor-aktor secara lintas batas, bergerak bebas, namun teratur berdasarkan kontur sistem regulasi negara yang berperan sebagai "*game-keeper*".⁵

Kami akan menguraikan kelima *genre* ini secara ringkas. Uraian ini penting dikemukakan agar kita dapat jelas dalam melihat posisi keterperangkapan ilmu sosial di Indonesia serta wacana seputar "dekolonisasi"-nya dalam pengembangan kajian di masa datang.

1. Konstruktivisme

Konstruktivisme melihat masyarakat pasca modern merupakan kelanjutan dari masyarakat modern yang terus berkembang sejalan dengan rasionalisasi. Sementara masyarakat modern merupakan kelanjutan dari masyarakat tradisional yang secara evolutif berubah oleh denyut pencerahan dan rasionalisasi. Cara pandang ini meyakini bahwa perkembangan masyarakat bersifat linear dan berdasar perkembangan rasionalisme masyarakat yang berlangsung dari waktu ke waktu. *Genre* ini dibangun oleh dua tradisi pemikiran yang sering dilihat sebagai saling bersaing, bertentangan, bahkan berkelahi. Keduanya, pada dasarnya bersaudara. Tradisi pertama, berakar dari tradisi Durkheimian dan Weberian yang menjadi inspirasi bagi berkembangnya teori-teori struktural fungsional awal hingga versi korektif seperti dikembangkan Niklas Luhmann dan generasi yang lebih baru.⁶

Tradisi kedua berakar dari pemikiran Marx namun mengalami metamorfosis yang cepat hingga lahir versi pemikiran modern menge-

⁵ John Urry (2000). *Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century*. London: Routledge

⁶ Niklas Luhmann, (1980). 'T.Parsons: Die Zukunft eines Theorieprogramms.' Dalam *Zeitschrift für Soziologie* 9 (1980). Niklas Luhmann, *Soziologische Aufklärung* (Opladen: 1981).

nai ekonomi-politik yang cukup cerdas untuk menangkap pergerakan masyarakat menuju struktur pasca modern. Mereka merangkum fenomena masyarakat pasca modern dalam konsep "kapitalisme lanjut" (*late-capitalism*). Kedua tradisi ini pada umumnya secara metodologis sangat positivistik. Mereka menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif sebagai instrumen pengumpulan data yang dilihat terpisah dari bangun teori maupun alat analisa yang dipergunakan.

2. Rekonstruktivisme

Sementara rekonstruktivisme melihat bahwa masyarakat modern merupakan metamorfosis masyarakat tradisional yang mengalami terpaan rasionalisasi. Akan tetapi, mereka melihat gambaran mengecewakan dari modernitas sebagai produk dari pencerahan. Dalam kaitan ini, Adorno dan Horkheimer, yang dipengaruhi oleh tradisi filsafat Kartesian dan juga pemikiran sosiologis Marx, menilai dunia modern sebagai ironi dehumanisasi yang diwarnai oleh semakin jauhnya jarak antara "kemajuan" dengan keadilan, pemerataan, kebahagiaan, dan demokrasi. Kedua tokoh teori kritis tersebut meletakkan pencerahan sebagai hal yang patut dipertanyakan kelanjutannya.⁷

Habermas mengambil posisi lebih realistis ketimbang kedua gurunya di atas. Ia mengatakan, tidak ada yang salah dengan pencerahan dan rasionalisasi. Hal yang perlu dilakukan, menurutnya, adalah melakukan *redirection* dari proses rasionalisasi yang selama ini terlalu menekankan lingkungan nilai ilmu pengetahuan, dengan juga lebih memperhatikan moralitas dan seni. Singkat kata, masyarakat post-modern implisit merupakan hasil rekonstruksi dari masyarakat modern melalui langkah penyeimbangan antara ilmu pengetahuan, moralitas dan seni. Karena Habermas lebih cenderung melihat realitas sosial sebagai bahasa dalam praktek komunikasi sehari-hari, implikasi metodologis pemikiran semacam ini adalah penggunaan metoda kualitatif non-positivistik seperti analisa percakapan dan sebagainya yang mempertautkan teori dengan metode secara erat.⁸ Metode dalam tradisi ini

⁷ Michael Payne ed. (1996). *A Dictionary of Cultural and Critical Theory*. Oxford: Blackwell Publishers.

⁸ Lihat Jürgen Habermas, (1991) *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of Society*. Volume 1, Cambridge: Polity Press; Jürgen Habermas, (1992). *The Theory of Communicative Action: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, Volume 2. Cambridge: Polity Press

tidak saja berusaha memahami makna (*Sinnverstehen*) dan organisasi sosial dari makna, namun juga menitik pada upaya mencari hubungan internal antara makna dan "validitas".

3. Dekonstruktivisme

Genre pemikiran dalam ilmu sosial yang ketiga adalah dekonstruktivisme. Ia melihat bahwa pencerahan telah menghantarkan masyarakat tradisional pada dunia kehidupan modern. Namun, kehidupan modern ditandai dengan lahirnya disparitas yang tidak dapat ditolerir. Sebagai contoh terjadi disparitas di antara simbol dengan realitas yang diwakilinya, pengetahuan para ahli dibedakan dengan pengetahuan orang kebanyakan, dan sebagainya. Sehingga, modernitas di tataran wacana dan ide perlu didekonstruksi. Dalam konteks ini, masyarakat post-modern merupakan hasil jadi yang berbeda sama sekali dengan masyarakat modern. Ia dibangun dari serpihan-serpihan dan puing yang dihasilkan dari proses penghancuran modernitas. Terdapat dua tradisi yang muncul di *genre* ini. Pertama adalah tradisi pemikiran pasca-modern (*post-modern*). Tradisi ini dikembangkan oleh terutama Baudrillard, Lyotard, Derrida dan lain-lain.

Tradisi kedua lebih banyak mencurahkan perhatian pada signifikasi dari representasi. Dalam kaitan ini kita dapat merujuk pada perkembangan dalam *semiotics* dan *hermeneutics* sebagai salah satu contoh bagaimana tradisi ini berdenyut dengan dinamis.⁹ Bangunan teori di atas tentu mempunyai implikasi metodologis yang dianggap khas. Metoda kualitatif non-positivistik di sini benar-benar melihat metoda sebagai hal yang tidak terpisahkan dengan teori. Sebagai contoh, semiotik yang mempertautkan *signifier*, *signified* dan *referent* dalam menjelaskan sebuah fenomena atau realitas sosial; dapat dipandang sebagai teori, namun pada saat yang bersamaan ia juga adalah metode.

4. Ilmu Sosial "Beyond Society"

Genre keempat dalam ilmu sosial mengeksplorasi kata "social" tidak "as society" namun "as mobility". Di era "post-societal" inilah kita

⁹ Beberapa karya tulis yang mencerminkan *genre* ketiga ini dapat dilihat dalam Jacques Derrida (1993). *Writing and Difference*. London: Routledge; Jean Baudrillard, (1983). *Simulations*. New York: Semiotext (e), Inc

memaknai perubahan yang kembali terjadi di mana mobilitas menjadi kata kunci yang menandai zaman ini. Mobilitas dalam konteks peradaban manusia di abad ke-21 ini berlangsung secara cepat dan aneka ragam. Tuntutan untuk senantiasa melakukan interpretasi dan reinterpetasi atas realitas sosial tersebut melahirkan perubahan-perubahan teoritis dan metodologis. Asumsi yang berkembang dalam pendirian *genre* keempat ini adalah, apabila sosiologi ingin terus menyumbang secara produktif terhadap pemahaman dari "the post-societal era", seyogyanya melupakan kekakuan-kekakuan warisan "the pre global era".

Dalam konteks ini, sosiologi seyogyanya mengalihkan perhatiannya kepada studi mengenai "mobilitas" fisik, imajinatif, virtual dan sebagainya. Ilmu sosial perlu merumuskan kembali "new rules" dari metode dan teori sosiologi yang cocok untuk konteks saat ini. Dengan demikian, kita tidak bisa lagi dipaku dalam kekakuan-kekakuan teori dan metodologi yang "konvensional". Ahli ilmu sosial yang memotori kelompok pemikiran ini diantaranya John Urry dan Alain Touraine seperti tergambar dalam beberapa tulisan mereka di awal tahun 2000-an.

5. Ilmu Sosial Virtual

Ilmu sosial virtual adalah *genre* pemikiran yang memiliki premis dasar yang sama dengan ilmu sosial "beyond society". Pandangan atas masyarakat masih didasarkan pada pemahaman yang sama bahwa "social as mobility". Pandangan tersebut mewarnai kajian-kajian yang mencoba mencermati aneka ragam mobilitas gerak virtual, makna yang berlarian, yang bergerak secara bebas dengan menggunakan instrumen-instrumen teknologi dan virtual. Proses sosial secara virtual menjadi salah satu amatan penting dalam pemikiran ilmu sosial ini.

Perbedaan ilmu sosial "beyond society" dengan ilmu sosial virtual terletak pada objek amatan mobilitas. Pada ilmu sosial "beyond society", objek amatan menitikberatkan pada mobilitas fisik: orang, benda teknologi, modal, dan lain sebagainya. Sementara pada ilmu sosial virtual, objek amatan lebih diarahkan pada mobilitas virtual, imajinasi, makna, dan lain sebagainya.

Mengurai Keterperangkapan Ilmu Sosial Indonesia

Pertanyaan yang amat mendesak bagi kita adalah bagaimanakah respon kita sebagai bagian dari komunitas akademik dalam menyikapi perkembangan cepat ilmu sosial tersebut? Seperti apa hakikat "otonomi" ilmu dan ilmuwan yang perlu dipegang, agar kita dapat leluasa mempertanyakan universalisme teori dan metode secara lintas waktu dan arena? Tentu beragam jawaban dapat dilayangkan atas pertanyaan tersebut. Tidak perlu malu kita mengakui bahwa pengalaman di masa lalu memperlihatkan bahwa telah berlangsung transfer dan impor pengetahuan dari belahan dunia Barat ke kalangan komunitas akademik banyak negara berkembang terutama di Indonesia. Produk pengetahuan, ilmu dan metodologi tersebut amat membantu kita dalam upaya pengembangan ilmu sosial. Namun seringkali kita menemukan kenyataan akan terbatasnya relevansi produk tersebut sehingga kajian menjadi bersifat infertil dan mencerminkan keterperangkapan yang seringkali tidak terlalu disadari. Uraian di bawah ini akan mengupas beberapa pola dari keterperangkapan ilmu sosial di negara berkembang terutama Indonesia.

1. Asumsi dan Teori A-Historis

Pada dasarnya, ilmu sosial tidak dapat lagi menggantungkan diri dari kontemplasi dan spekulasi logika para teoritisinya. Ilmu sosial berkembang dengan berpijak pada fakta-fakta empiris yang dihasilkan dari objek kajian yang diteliti. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa "imported theory" dari Barat sarat dengan proses interaksi sosial yang terjadi dalam mengkaji fakta-fakta empiris masyarakat Barat. Jika asumsi dan teori tersebut digunakan "langsung" untuk menelisik perubahan sosial di Indonesia, maka yang mungkin terjadi adalah irelevansi dan ketidakterapan.

Pemaksaan "kehendak" asumsi dan teori, tidak hanya hinggap pada kalangan ilmuwan sosial Barat yang sering disebut sebagai kalangan orientalis. Kalangan ini, seperti yang banyak ditemukan secara implisit ataupun eksplisit dalam teori modernisasi memiliki serangkaian kelemahan mendasar. Cara pandang dikotomis antara yang modern dan yang tradisional dengan pemaksaan bahwa modernitas adalah "progress" dari fase masyarakat sebelumnya dinilai sebagai menggunakan nilai dan budaya Barat sebagai titik tolak pemikiran.

Pemaksaan yang berujung pada irelevansi dan ketidakterapan juga sering terjadi pada ilmuwan sosial Indonesia yang mencoba menjadikan teori-teori yang tidak berpijak pada realitas sosial ke-Indonesiaan sebagai panduan bahkan ideologi. Hasil akhir dari proses ini adalah kegagalan menangkap dan menginterpretasikan realitas sosial. Lebih dari itu, kegagalan mencari penyelesaian masalah yang historis.

2. Ekstrimitas Metodologi

Dalam memahami metodologi ilmu sosial, terdapat dua ekstrim perspektif yang memandang signifikansi metodologi dalam kajian-kajian ilmu sosial termasuk masalah perubahan sosial. Pada satu sisi, terdapat kalangan ilmuwan sosial yang memandang metodologi sebagai kunci paling penting dalam melakukan kajian-kajian sosial. Dalam pandangan ini, seringkali metodologi dijadikan ukuran utama untuk menilai kesahihan sebuah kajian sosial. Sehingga, metodologi lebih dianggap sebagai tujuan (*ends*) daripada alat/instrumen (*means*). Tradisi ilmu sosial aliran *behavioralisme* (tingkah laku) dianggap sebagai motor utama gerakan pemikiran yang menempatkan masalah metodologi sebagai kunci utama.

Pada ekstrem yang lain, terdapat kalangan anarkis yang punya kecenderungan untuk menolak metodologi untuk diperlakukan sebagai hal yang kaku dalam proses pembentukan pengetahuan. Mereka bahkan menganggap bahwa perspektif anarkhis lebih bersifat humanitarian dalam mendorong kemajuan dari tata aturan yang termaktub dalam serangkaian prinsip-prinsip metodologis. Paul Feyerabend sebagai salah satu pemikir anarkisme mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

*"...everyone can read the terms in his own way and in accordance with the tradition to which he belongs. Some people believe the quantum theory to be a theory of this kind. For others, 'progress' may mean unification and harmony, perhaps even at the expense of empirical adequacy. This is how Einstein viewed the general theory of relativity. And my thesis is that anarchism helps to achieve progress in any one of the sense one cares to choose. Even a law-and-order science will succeed only if anarchistic moves are occasionally allowed to take place."*¹⁰

¹⁰ Paul Feyerabend (1978). *Against Method. Outline of an anarchistic theory of knowledge*. London: Verso, hlm. 27.

Kedua pandangan ekstrem perspektif tersebut seringkali menghinggapi kalangan ilmuwan sosial termasuk di Indonesia. Dalam konteks ini, metodologi tidak lagi dipandang sebagai proses *trade and sell* yang senantiasa berkembang dari realitas sosial yang dikaji dan tengah dimasuki para ilmuwan sosial. Metodologi sejatinya merupakan suatu kaidah dan prinsip penting yang digunakan sebagai instrumen untuk melakukan kajian sosial. Pegangan pada metodologi yang relevan dengan permasalahan dan konteks sangat berguna untuk menginterpretasikan fakta-fakta empiris. Namun demikian, seorang ilmuwan sosial harus diberikan kebebasan dalam melakukan penyesuaian yang dibutuhkan untuk menyelaraskan kaidah-kaidah ketat metodologis dengan fakta empiris di lapangan. Tanpa proses penyesuaian dan adaptasi metodologi pada realitas, yang akan terjadi adalah ilmuwan yang menjadi robot yang dikendalikan oleh metodologi yang kaku dan ketat.

3. Kehilangan Orientasi

Masalah orientasi ilmu sosial sesungguhnya lebih terkait dengan beberapa hal. *Pertama*, orientasi dalam pengertian filosofis berupa renggangnya penetapan masalah-masalah kajian atau penelitian sosial dengan upaya mengatasi persoalan yang nyata hadir di masyarakat. Dalam filsafat ilmu, hal ini terkait dengan aspek tautologis ilmu pengetahuan yang tidak berdiri sendiri kendati dianjurkan untuk bersikap otonom dan independen dari kepentingan. Masalah ini klasik dalam penetapan orientasi ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan senantiasa dibayangi beragam kepentingan yang ada dalam masyarakat terutama penghambaan pada kekuasaan dan ideologi. Tidak sekedar itu, lemahnya signifikansi masalah menyertakan pembahasan-pembahasan yang remeh temeh dibandingkan dengan agenda-agenda besar perubahan sosial. *Kedua*, orientasi ilmu sosial seringkali dipengaruhi oleh suatu *genre* pemikiran yang belum tentu mengakar pada masalah-masalah nyata yang hadir di masyarakat. Bahkan, seringkali pegangan yang kuat pada satu *genre* pemikiran kerap dijadikan pegangan yang lebih bersifat ideologis. Teori-teori yang dihasilkan dalam *genre* pemikiran tertentu memang berguna sebagai instrumen untuk menjelaskan fenomena dan fakta sosial. Namun, keyakinan yang berlebihan pada suatu *genre* atau teori seringkali menjebak kalangan ilmuwan sosial dalam posisi sub-ordinat dari gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya. Akibatnya adalah diabaikannya konteks dan realitas itu sendiri serta

teori dan *genre* tidak lagi menjadi instrumen, tetapi menjadi semacam panduan atau tujuan. *Ketiga*, ilmu sosial kerap dihadapkan pada persoalan sulit antara mempertimbangkan suatu pemikiran dan dihasilkannya teori serta metode yang berpegang pada kaidah-kaidah ilmiah yang ketat sehingga memiliki validitas yang tinggi namun memerlukan waktu yang cukup lama sehingga kadangkala masalah yang dijadikan fokus kajian tidak lagi *up to date*. Di sisi lain, ia dihadapkan pada kebutuhan praktis untuk menjawab masalah-masalah yang nyata hadir di tengah-tengah masyarakat secara cepat dengan resiko minimnya ketaatan pada kaidah-kaidah ilmiah. Pilihan pada salah satunya, seringkali menjadi perangkap bagi para ilmuwan sosial. Berdiri pada titik tumpu keseimbangan untuk mempertimbangkan secara seksama kaidah-kaidah keilmuan seraya tetap berpegangan pada konteks masalah dan kebutuhan memberikan eksplanasi dan solusi adalah upaya yang tidak mudah. Namun demikian, pilihan ini kiranya bisa dijadikan batu sandaran bagi kalangan ilmuwan sosial di dalam melakukan kajian serta penelitian-penelitian sosial.

"Dekolonisasi" Ilmu Sosial: Sebuah Keniscayaan?

Beberapa kalangan intelektual kita berkali-kali mengingatkan untuk melakukan upaya penciptaan ilmu sosial pada format yang lebih "otonom".¹¹ Diperlukan peletakan fondasi ilmu sosial di Indonesia pada format yang lebih kontekstual dan historis. Artinya menyelaraskan aspek metodologis serta posisi premis teoritis pada konteks kita sendiri.

¹¹ Kontekstualisasi dan indigenisasi dalam ilmu-ilmu sosial merupakan area kajian yang sudah banyak diulas oleh berbagai ilmuwan sosial di Indonesia. Ignas Kleden melihat kebutuhan indigenisasi ini terkait dengan setidaknya tiga alasan: akademis (kerangka teoritis dan prinsip metodologi), ideologis dan teoritis. Lihat Ignas Kleden (1987). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* Jakarta: LP3ES, hlm. 3-23. Lihat juga Iwan Gardono Sudjatmiko (1998). 'Indigenisasi Sosiologi Indonesia,' *Jurnal Masyarakat*, Edisi/Volume No. 6, 1998, hlm. 25-44. Sejarawan Indonesia telah mencoba meletakkan suatu historiografi yang Indonesiasentris untuk menggantikan historiografi kolonial yang tidak relevan. Lihat, Sartono Kartodirdjo (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* Jakarta: Gramedia, hlm. 29-43. Lihat juga Taufik Abdullah, (1983). 'Ilmu Sosial dan Peranannya di Indonesia.' *Prisma*, Jakarta: LP3ES, Juni.

"Otonomi" ilmuwan sosial juga terkait dengan upaya untuk senantiasa mempertanyakan pentingnya dan relevansi masalah-masalah yang ditanganinya. Dalam hal ini para ilmuwan sosial langsung berhadapan dengan nilai-nilai pokok bangsanya. Komitmen ilmuwan sosial pada dasarnya merupakan komitmen untuk menciptakan kehidupan adil dan makmur.¹²

Dengan demikian, ilmu sosial di Indonesia tidak dihindari suatu penyakit *inferiority complex* yang bersikap sub-ordinat pada teori-teori Barat. Rasa rendah diri tersebut tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang lahir dari carut marut masa lalu sebagai buah perkawinan antara formasi feodalisme dan kolonialisme yang begitu panjang. Struktur sosial yang hirarkis dan feodalistik telah meminggirkan nilai-nilai kepercayaan, egalitarianisme, independensi, kompetitif dan lain sebagainya.¹³ Persinggungan dengan tradisi pemikiran serta ilmu pengetahuan Barat tidak saja melahirkan ekstase kalangan ilmuwan kita, namun lebih dari itu muncul semacam euforia (*scientific euphoria*) untuk seringkali secara gegabah mengadopsi metode dan premis-premis teoritis yang khas Barat dalam menguliti masalah-masalah sosial di Indonesia. Singkat kata, upaya penekanan pada penyelarasan aspek metodologis serta premis-premis teoritis dalam konteks yang ada diharapkan akan melahirkan sikap intelektual yang otonom, egaliter, dan bersifat historis.

¹² Soedjatmoko, (1984). 'Etik dalam Perumusan Strategi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial.' Dalam A.E. Priyono dan Asmar Oemar Saleh (ed), *Krisis Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PLP2M, hlm. 115-116.

¹³ Dalam kaitan ini Albert O. Hirschman menyatakan salah satu tesis yang menghubungkan pengaruh struktur sosial terhadap perkembangan kapitalisme khususnya di Amerika Serikat yang ia sebut sebagai *the feudal blessings thesis*. Menurut tesis ini, ketiadaan latar belakang feodalisme lebih memudahkan Amerika melakukan transformasi kapitalisme dibandingkan masyarakat lainnya. Lihat Albert O. Hirschman, (1982). 'Rival Interpretation of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?' *Journal of Economic Literature*, Vol. XX, December, hlm. 1463-1484.

1. Relevansi

Persoalan relevansi ilmu sosial dengan konteks di mana ia berada, sesungguhnya telah menjadi area kajian tersendiri dalam sosiologi dan filsafat ilmu sosial. Alasannya, misalnya, menunjuk persoalan relevansi tersebut dengan istilah "ketidaktepatan" antara segala hal yang berasal dari Barat dengan konteks negara dunia ketiga. Ketidaktepatan yang terangkum dalam kurangnya orisinalitas, ketidaksesuaian antara asumsi dan kenyataan, ketidakterapan, alienasi, keremehan, kekeliruan tersebut mewabah ilmu-ilmu sosial di dunia ketiga dalam berbagai tingkat: mulai dari tingkat metaanalisis, teori, kajian empiris, dan pada ilmu sosial terapan.¹⁴ Hal ini berakibat pada munculnya ketergantungan akademik dan "mental tahanan" pada ilmu-ilmu sosial dunia ketiga termasuk Indonesia. Dalam konteks ini yang dipermasalahkan bukanlah asal ilmu tersebut dari Barat, tetapi persoalan unsur-unsur atau kriteria ketepatan. Namun demikian, kajian-kajian yang dihasilkan dalam menangkap gejala sosial yang sama dapat mempunyai arti dan makna yang berbeda bagi orang-orang yang mempunyai kebudayaan yang berlainan.¹⁵ Dalam sebuah kajian, sangat dimungkinkan terjadinya bias nilai yang berujung pada kesalahan atau kegagalan dalam menginterpretasikan realitas sosial. Sebagai akibatnya, ilmu sosial tidak saja menjadi tidak membumi, namun lebih dari itu dapat membahayakan.

Dengan demikian, mencari relevansi dan kontekstualisasi adalah penting sebagai orientasi ilmu sosial Indonesia ke depan. Ilmuwan sosial Indonesia tidak perlu menjadikan kedekatan dengan realitas sosial sebagai salah satu titik lemah. Hal ini bisa disiasati dengan menjaga sikap objektif dan tak terpengaruh (*detachment*) atas objek kajian. Setelah sikap ini dikembangkan dalam mengkaji objek kajian,

¹⁴ Syed Farid Alatas, (2003). 'Pengkajian Ilmu-Ilmu Sosial: Menuju ke Pembentukan Konsep Tepat.' *Jurnal Antropologi Indonesia*, Tahun XXVII No. 72, September-Desember 2003, hlm. 1-23.

¹⁵ Dalam kaitan ini dipandang penting mengingat sikap yang pernah disampaikan oleh Prof. Selo Soemardjan yang menghargai peneliti dan sarjana Barat dalam memahami masalah-masalah sosial di Indonesia dengan metodologi dan disiplin ilmiah, meskipun terdapat kecenderungan munculnya pandangan kebudayaan tertentu yang mereka miliki. Walaupun demikian, masalah relativisme kebudayaan harus mampu diatasi dengan peningkatan kualitas akademik ilmuwan sosial kita. Lihat Selo Soemardjan, (1981). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 1-3.

mereka harus tergerak untuk memberikan solusi-solusi praktis atas masalah-masalah tersebut. Strategi metodologi dan teori harus mempertimbangkan dua prinsip dasar: akseptabel terhadap prinsip dan kaidah-kaidah keilmuan serta interaksi intens dengan realitas. Dengan strategi seperti ini diharapkan ilmu sosial Indonesia mampu berdiri sejajar dalam dialog peradaban dengan ilmu serupa yang berkembang di belahan dunia lain termasuk Barat. Pendek kata, ilmu sosial harus mampu memperlihatkan kenyataan sosial dengan menggunakan teori dan konsep yang tepat dari sebanyak-banyaknya segi kebudayaan dan peradaban.¹⁶ Dengan demikian, diharapkan terjadi konvergensi dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial.

3. Metoda sebagai Praktek

Metoda sebagai praktek memperlakukan metodologi ilmu sosial sebagai proses "trade and sell" antara ragam aktor di lapangan yang membuka ruang kebebasan bagi peneliti untuk berkreasi dalam konteks lapangan yang tengah dijelajahnya. Dalam perkembangan ilmu sosial di Indonesia, keterperangkapan di tataran metodologi berada dalam kondisi yang lebih buruk dari keterperangkapan teori. Dalam konteks teori-teori sosial, masih cukup banyak ilmuwan sosial yang melakukan pengembangan dan penyesuaian teori dalam konteks ke-Indonesiaan. Namun dalam hal metodologi, sangat sedikit upaya pengembangan metode-metode yang dihasilkan dari kajian-kajian masalah sosial di Indonesia. Metode historiografi yang dibangun Sartono Kartodirdjo adalah salah satu dari yang sedikit dan berhasil melakukan pembangunan metodologi yang lepas dari metode historiografi kolonial. Prof. Sartono berusaha melepaskan diri dari historiografi kolonial yang dibangun tanpa melibatkan perspektif "Indonesia" dan peranan rakyat dalam proses sejarah. Ia menggunakan beragam disiplin dan perspektif dalam mengajukan analisa sejarah Indonesia.¹⁷ Tentunya kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena upaya pembangunan

¹⁶ *ibid.*, hlm. 16.

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, lihat juga ulasan mengenai dekolonisasi historiografi Indonesia dalam Henk Schulte Nordholt, "De-colonising Indonesian Historiography", paper yang dipresentasikan dalam Center for East and South-East Asian Studies, 25-27 Mei 2004.

metodologi yang tepat dan sesuai dengan konteks akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan ilmu sosial khususnya dalam menjelaskan perubahan sosial.

Metodologi seyogyanya dijadikan pegangan dalam melakukan kajian-kajian sosial. Namun demikian, ilmuwan yang terlibat untuk memberikan eksplanasi dan solusi atas suatu permasalahan sosial sepatutnya diberikan kebebasan untuk melakukan proses penyesuaian (*adjustment*) dari fakta empirik serta kesulitan dalam proses pengumpulan data. Dengan pendekatan dan perlakuan seperti ini, diharapkan akan terbangun metodologi yang sesuai dengan konteks permasalahan masyarakat kita. Sehingga perkembangan ilmu sosial Indonesia akan diwarnai juga dengan semakin intensnya kehadiran metodologi-metodologi ilmu sosial.

3. Kebebasan Intelektual

Selain persoalan relevansi dan ketepatan, iklim kebebasan intelektual di kalangan akademisi merupakan elemen sentral dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial dan dalam kehidupan akademik.¹⁸ Otonomi akademik juga berarti adanya otonomi institusional dari universitas untuk melakukan pengelolaan pendidikan. Implikasi dari sikap ilmiah dan posisi intelektual ini diharapkan mampu mengobati masalah mendasar dalam aspek tautologis ilmu sosial di Indonesia. Ilmu pengetahuan yang bernilai adalah ilmu pengetahuan yang mampu menjawab secara praktis masalah-masalah sosial yang hinggap pada lingkungannya. Permasalahan bangsa yang sangat kompleks saat ini harus melecut tumbuhnya keprihatinan di kalangan ilmu sosial karena minimnya sokongan keilmuan secara praktis untuk mencoba memberikan solusi atas problematik tersebut. Kompleksitas masalah bangsa di antaranya disebabkan kegagalan ilmu sosial dan pendidikan tinggi dalam mencari alternatif yang historis dan kontekstual dari profesi keilmuannya.

Gejala *infertilitas* merujuk pada kecenderungan kekurangmampuan ilmu-ilmu sosial dalam menghasilkan konsep, konstruk, teori

¹⁸ Seumas Miller, (2000). 'Academic Autonomy.' Dalam Tony Coady (ed), *Why University Matter: A Conversation About Values, Means and Directions*. St Leonnard New Sout Wales: Allen & Unwin Pty Ltd, hlm 110-115.

dan metodologi yang dapat mendeskripsikan, memprediksikan perubahan sosial yang terjadi.¹⁹ Padahal, kemampuan untuk melakukan analisa dengan *predictive value* yang memadai sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang mendesak.²⁰ Di sisi lain, terdapat tuntutan akan kewajiban sejarah ilmuwan sosial untuk turut membangun kemanusiaan dan peradaban. Dalam konteks perubahan sosial di Indonesia saat ini yang penuh gejolak, ilmu sosial harus mampu berdiri tegar di tengah gejolak perubahan untuk turut menciptakan Indonesia yang madani dan demokratis. Ia harus mampu berpijak di bumi Indonesia, kendati hakekat ilmu pengetahuan adalah universal.²¹

Dalam konteks ilmuwan sosial Indonesia terdapat beberapa hal yang menarik untuk dijadikan bahan renungan kita semua. Seperti diuraikan oleh Daniel Dhakidae dan Vedi Hadiz bahwa cerita ilmu sosial di Indonesia adalah cerita tentang kekuasaan. Format negara yang begitu kuat telah menjadikan ilmuwan sosial Indonesia memiliki orientasi pemburuan kekuasaan. Kondisi inilah yang melahirkan corak ilmu sosial yang lebih bersifat instrumental dan pragmatik, ketimbang kritis dan reflektif.²² Sifat ini mendorong terjadinya sub-ordinasi ilmuwan sosial di dalam kekangan struktur dan langgam kekuasaan negara. Terjadi pengerdilan orientasi ilmu sosial, dari keharusan mengatasi masalah-masalah riil masyarakat tergerus mentalitas pesanan untuk mendandani kebijakan pemerintah. Intimitas negara dan ilmuwan sosial dibungkus dengan penghalusan-penghalusan dalam istilah, mulai dari kajian, studi dan penelitian terapan. Sayangnya, tuntutan formasi *developmentalisme* yang sedianya diharapkan

¹⁹ Moeljarto Tjokrowinoto, 'Krisis Kepercayaan Terhadap Peran Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia.' Dalam A.E. Priyono dan Asmar Oemar Saleh (ed), *op.cit.* hlm. 183-195.

²⁰ Sediono M.P. Tjondronegoro, (1998). *Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 400-414.

²¹ Parsudi Suparlan, (1999). 'Antropologi Indonesia dalam Memasuki Abad ke-21.' *Jurnal Antropologi Indonesia* Th. XXIII, No. 58, Januari-April, hlm. 1-4.

²² Vedi R. Hadiz & Daniel Dhakidae, (2004) *Social Science and Power in Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing & Institute of Southeast Asian Studies.

dapat menumbuhkembangkan ilmu sosial terapan (*applied social sciences*) yang berguna, malah berbuah *malpraktek* hubungan negara-ilmuwan sekaligus melupakan tugas historis ilmu sosial. Kondisi seperti ini tidak banyak berubah di masa-masa berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Ilmuwan sosial kembali terlibat dalam permainan simbol dan wacana yang dihasilkan era baru dengan sikap yang sama. Pemikiran-pemikiran yang reflektif, kritis namun juga konstruktif bagi pengatasan masalah-masalah sosial-politik bagi masyarakat tetap tandus dalam suasana meranggasnya ilalang perubahan.

Kesimpulan

Beragam perspektif dan *genre* dalam ilmu sosial telah menempatkan masyarakat dengan cara pandang yang berbeda. Teori kritis (rekonstruktivisme) misalnya melihat realitas sosial sebagai bentuk kesadaran yang teralienasi yang di-reproduksi oleh institusi-institusi kemasyarakatan. Fungsionalisme (konstruktivisme) menempatkan masyarakat sebagai sistem sosial dengan beraneka bagian yang terintegrasi secara fungsional satu sama lain. Teori posmodernisme (dekonstruktivisme) melihat realitas sosial sebagai konstruksi linguistik. Sementara, perspektif *post-societal* melihat realitas sosial sebagai aneka ragam mobilitas.²³ Beragam perspektif di atas implikatif pada format metodologinya masing-masing, yang biasanya konsisten pada demarkasi yang tegas.

Secara kolektif, ilmuwan sosial Indonesia dituntut untuk menjalankan peran pengembangan ilmu dengan merujuk pada akumulasi temuan teoritik dan kreasi metodologis seperti dikemukakan di atas. Namun, para ilmuwan ditantang pula untuk berperan sebagai inspirator penyelesaian permasalahan nyata kemanusiaan dan peradaban bangsa. Kedua peran di atas baru dapat dijalankan secara optimal jika ilmuwan sosial kita membebaskan diri dari keterperangkapan ganda di antara asumsi dan teori, metodologi, bahkan orientasi.

Format peranan ilmuwan sosial kita sebagai inspirator dalam pemecahan masalah, perlu dieksplorasi secara lebih cermat dalam

²³ Urry, *op.cit.*, hlm. 6-7.

konteks kita sendiri. Ilmuwan sosial di negara berkembang terutama Indonesia perlu hati-hati dan tidak terjebak fatamorgana ahistoris. Sebagai contoh, Bourdieu menyebut dua fungsi utama ilmuwan ini dalam fungsi kritis (*negative function*) dengan memproduksi dan mendiseminasikan instrumen untuk melawan simbol-simbol yang dominan dan menyesatkan masyarakat. Sementara di sisi lain juga menjalankan peran konstruktif (*positive function*) dengan jalan berusaha merekonstruksi dan melakukan penemuan-penemuan ilmiah yang berguna dalam mengatasi masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari.²⁴ Contoh lain, Bottomore menempatkan intelektual sebagai salah satu kelompok elit di samping industriawan dan elit birokrasi.²⁵ Apakah ilmuwan sosial Indonesia merumuskan peran "praktikal" sama seperti yang difahami kedua pemikir Barat di atas? Tampaknya terbuka ruang kebebasan untuk menembus tapal batas yang sempit dan secara rendah diri ditorehkan sendiri.

Pembebasan ilmu sosial dari keterperangkapan ganda serta penentuan posisi yang kontekstual diharapkan mampu mengangkat ilmu dan ilmuwan sosial pada keadaan yang lebih produktif, tidak infertil. Dalam kaitan ini, kita menaruh harapan di masa datang lahir figur-figur ilmuwan dengan gagasan besar yang mampu berdiri sejajar dalam dialog ilmu dengan sejawat dari Barat, serta menjadi inspirator dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penting agenda perubahan sosial saat ini.*****

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, (1983). 'Ilmu Sosial dan Peranannya di Indonesia.' *Prisma*, Juni. (Jakarta: LP3ES, Juni, 1983).
- Alatas, Syed Farid, (2003). 'Pengkajian Ilmu-Ilmu Sosial: Menuju ke Pembentukan Konsep Tepat.' *Jurnal Antropologi Indonesia*, Tahun XXVII No. 72, September-Desember 2003.
- Baudrillard, Jean (1983). *Simulations*. New York: Semiotext (e), Inc.

²⁴ Pierre Bourdieu, (2001). 'For a Scholarship with Commitment.' Dalam Pierre Bourdieu, *Firing Back*. New York: The New Press, hlm. 20-21.

²⁵ Tom Bottomore, (1993). *Elites and Society*, Second Edition, London: Routledge, 1993, hlm. 52-71.

- Bottomore, Tom, (1993). *Elites and Society*. Second Edition, London: Routledge.
- Bourdieu, Pierre, (2001). 'For a Scholarship with Commitment.' Dalam Pierre Bourdieu (ed). *Firing Back*. New York: The New Press.
- Derrida, Jacques (1993). *Writing and Difference*. London: Routledge.
- Feyerabend, Paul, (1978). *Against Method: Outline of an anarchistic theory of knowledge*. London: Verso.
- Habermas, Jürgen (1991). *The Theory of Communicative Action: Reason and The Rationalization of Society*, Volume 1, Cambridge: Polity Press.
- Habermas, Jürgen (1992). *The Theory of Communicative Action: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, Volume 2, Cambridge: Polity Press.
- Hadiz, Vedi R. & Daniel Dhakidae, ed. (2004). *Social Science and Power in Indonesia*, Singapore: Equinox Publishing & Institute of Southeast Asian Studies.
- Hidayat, Dedy Nur (2000). 'Teknik Penulisan Proposal Penelitian Berorientasi Murni Akademik,' makalah dalam Workshop Pengembangan Penelitian FISIP-UI, Depok 30 Januari 2000.
- Hidayat, Dedy Nur, (2005). 'Teori dan Penelitian Dalam Teori-Teori Kritis.' *Jurnal Thesis*, Volume IV, No. 2.
- Hirschman, Albert O., (1982). 'Rival Interpretation of Market Society: Civilizing, Destructive, or Feeble?' *Journal of Economic Literature*, Vol. XX (December 1982).
- Kartodirdjo, Sartono, (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Kleden Ignas, (1987). *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Luhmann, Niklas, (1980). 'T.Parsons: Die Zukunft eines Theorieprogramms.' *Zeitschrift für Soziology* 9 (1980).
- Luhmann, Niklas (1981). *Soziologische Aufklärung* (Opladen: 1981).
- Miller, Seumas, (2000). 'Academic Autonomy.' Dalam Tony Coady (ed), *Why University Matter: A Conversation About Values, Means and*

Directions. St Leonnard New Sout Wales: Allen& Unwin Pty Ltd.

- Nordholt, Henk Schulte, (2004). 'De-colonising Indonesian Historiography.' Makalah yang dipresentasikan dalam Center for East and South-East Asian Studies, 25-27 Mei 2004
- Payne, Michael, (1996). *A Dictionary of Cultural and Critical Theory*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Purdue, William D. (1986). *Sociological Theory: Explanation, Paradigm and Ideology*. California: Mayfield Publishing Company.
- Soedjatmoko, (1984). 'Etik dalam Perumusan Strategi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial.' Dalam A.E. Priyono dan Asmar Oemar Saleh (ed), *Krisis Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PLP2M.
- Soemardjan, Selo, (1981). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Somantri, Gumilar Rusliwa, (2003). 'Towards Democracy Beyond Societies: A Study of Internet Practices in Indonesian Politics.' Dalam Indrajit Banerjee (ed), *Rhetoric and Reality: The Internet Challenge for Democracy in Asia*. Singapore: Eastern Universities.
- Sudjatmiko, Iwan Gardono, (1998). 'Indigenisasi Sosiologi Indonesia.' *Jurnal Masyarakat*, Edisi/Volume No. 6.
- Suparlan, Parsudi, (1999). 'Antropologi Indonesia dalam Memasuki Abad ke-21.' *Jurnal Antropologi Indonesia* Th. XXIII, No. 58, Januari-April 1999.
- Urry, John (2000). *Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century*, London: Routledge.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, (1984). 'Krisis Kepercayaan Terhadap Peran Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia.' Dalam A.E. Priyono dan Asmar Oemar Saleh (ed), *Krisis Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PLP2M.
- Tjondronegoro, Sediono M.P., (1998). *Keping Keping Sosiologi dari Pedesaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**Jurusan Ilmu Sosiatri:
"Hidup" Tak Banyak Orang Tahu,
"Mati" Jangan Dulu ***

*Susetiawan ***

Abstract

The origin and the existence of Jurusan Ilmu Sosiatri have been discussed and produce various interpretation. The issues mostly deal with the status of pribumi and European-based science. Among these, some believe that Sosiatri is a specific Indonesian science. This article explains the history, contribution and the new agenda of Jurusan Ilmu Sosiatri in order to portray the development of Sosiatri.

Kata-kata kunci:

Ilmu sosiatri; community development; social welfare, dan social works

Sekitar pertengahan tahun 1980-an, perkembangan ilmu sosial di Indonesia banyak dipersoalkan. Persoalan ini muncul ketika periode pembangunan di Indonesia banyak didominasi pemikiran positivistik

* Tulisan ini merupakan revisi atas makalah yang disampaikan dalam Seminar keilmuan dalam rangka Dies Natalis ke 50 Fisipol UGM tgl 12 September 2005.

** *Susetiawan* adalah staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta.